

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tesis, April 2016**

**RIZAWATI No. BP 1220322031**

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP LEGALISASI ABORSI ATAS INDIKASI PERKOSAAN DI  
KOTA PADANG**

**ABSTRAK**

Dalam menekan angka kematian ibu di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 yang bertujuan melegalkan aborsi untuk kesehatan reproduksi atas indikasi medis dan kasus perkosaan. Kebijakan tersebut menuai banyak pro dan kontra di tengah masyarakat, baik dari pelaku kesehatan, tokoh agama dan juga dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap legalisasi aborsi atas indikasi perkosaan di Kota Padang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif. Informan penelitian ini adalah Tokoh Agama dari semua unsur agama, Tokoh adat Minang seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tokoh Sosial seperti tokoh wanita dan tokoh pemuda yang ada di kota Padang. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*). Data dianalisis secara triangulasi.

Hasil penelitian didapatkan pengetahuan tokoh masyarakat mengenai aborsi yaitu pengguguran kandungan, dilakukan karena faktor zina, kesehatan dan ekonomi. Metode yang dilakukan tradisional dan tindakan medis. Pandangan terhadap aborsi oleh tokoh masyarakat menyatakan aborsi dilarang karena adat di minangkabau, namun, tindakan aborsi diperkenankan apabila ada alasan medis. Pengetahuan tokoh masyarakat mengenai legalisasi aborsi didapatkan masih banyak yang belum terpapar mengenai aturan legalisasi aborsi. Pandangan terhadap isu, kendala dan dampak legalisasi aborsi oleh tokoh masyarakat menyatakan aturan legalisasi aborsi ini harus tegas dan jelas batasan dan sanksinya, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Saran dan harapan terkait legalisasi aborsi yaitu aturan ini tidak sesuai untuk dilaksanakan di Sumatera Barat khususnya untuk kota Padang, karena tidak sesuai dengan adat minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Penelitian ini menyarankan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kontrol dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 mengenai legalisasi Aborsi agar masyarakat mengetahui tentang batasan dalam aturan tersebut dan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

**Daftar Pustaka** : 27 (2004-2014)

**Kata Kunci** : Persepsi tokoh masyarakat, legalisasi aborsi indikasi perkosaan